

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan menjadi negara maju. Salah satunya Indonesia yang merupakan negara berkembang dan terus berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan di daerah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah. Pemerintah terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pada daerah yang kondisi ekonominya belum baik. Hal ini dilakukan agar angka kemiskinan menurun seiring berjalannya waktu. Kemiskinan masih menjadi ancaman pada setiap wilayah di Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan lapangan kerja. Kemiskinan adalah “ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi standar kebutuhan minimum”. (Kuncoro, 2017)

Menurut Chamber, kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun secara sosiologis. Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Dalam SDG's dinyatakan bahwa pengentasan kemiskinan (*no poverty*) sebagai poin pertama. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia, tanpa terkecuali di Indonesia.

Di Indonesia, isu kemiskinan termasuk persoalan yang pelik. Indonesia sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen untuk mengatasi isu tersebut seiring dengan deklarasi SDG's. Isu kemiskinan di Indonesia merupakan kesenjangan antara golongan “kaya” dan golongan “miskin”. Terdapat 25,79 juta orang yang hidup di

bawah garis kemiskinan dari total seluruh penduduk di Indonesia (World Bank, 2023). Maka dapat dilihat bahwa sekitar 10% dari penduduk Indonesia dapat dikatakan masih berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu menurut data yang dikeluarkan oleh World Bank menunjukkan bahwa masyarakat yang masih berkategori sebagai ekonomi rentan terdapat sekitar 20.19% dari seluruh penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kemiskinan. “Upaya mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara serentak” (Nasir, 2018)

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi agenda internasional berkaitan dengan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan antara tiga dimensi pembangunan, SDGs didasarkan pada lima landasan utama: Manusia, Bumi, Kemakmuran, Perdamaian, dan Kemitraan, dan bertujuan untuk mencapai tiga tujuan mulia pada tahun 2030: pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Terlepas dari dua tujuan lainnya, kemiskinan masih merupakan isu penting dan sentral.

Peran strategis pemerintah daerah dalam mencapai SDGs sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi layanan publik dan indikator SDG di tingkat daerah. Penerapan prinsip-prinsip SDG di sektor pemerintahan akan meningkatkan kinerja, membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan industri sekitar, serta turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membantu mencapai SDGs, diperlukan informasi mengenai potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Secara khusus, ketersediaan informasi mengenai potensi lokal tercermin dalam modal intelektual atau *Intellectual Capital* (IC) (Luthfiah dkk.,) *Intellectual Capital* yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia memfasilitasi penyampaian layanan pemerintah daerah. (Atidira & Priyono, 2020)

Di dalam menunjang pencapaian SDGs tersebut, diperlukan informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah di

Indonesia. Potensi ini dapat diketahui melalui pemetaan modal intelektual di mulai dari Karesidenan Surabaya dan Bojonegoro sebagai salah satu bagian dari provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi terpadat di Indonesia. (Anugerah dkk., 2021)

Tingkat kemiskinan di karesidenan Surabaya dan karesidenan Bojonegoro dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, namun tetap saja tingkat kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase provinsi Jawa Timur. Permasalahan kemiskinan harus diselesaikan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan membutuhkan keterpaduan antar kebijakan rencana yang terpencair di berbagai sektor. Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan di tingkat nasional, namun juga dapat dilaksanakan di provinsi dan daerah. (Rogahang dkk., 2023)

**Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen)		
	2020	2021	2022
Pacitan	14.54	15.11	13.80
Ponorogo	9.95	10.26	9.32
Trenggalek	11.62	12.14	10.96
Tulungagung	7.33	7.51	6.71
Blitar	9.33	9.65	8.71
Kediri	11.40	11.64	10.65
Malang	10.15	10.50	9.55
Lumajang	9.83	10.05	9.06
Jember	10.09	10.41	9.39
Banyuwangi	8.06	8.07	7.51
Bondowoso	14.17	14.73	13.47

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen)		
	2020	2021	2022
Situbondo	12.22	12.63	11.78
Probolinggo	18.61	18.91	17.12
Pasuruan	9.26	9.70	8.96
Sidoarjo	5.59	5.93	5.36
Mojokerto	10.57	10.62	9.71
Jombang	9.94	10.00	9.04
Nganjuk	11.62	11.85	10.70
Madiun	11.46	11.91	10.79
Magetan	10.35	10.66	9.84
Ngawi	15.44	15.57	14.15
Bojonegoro	12.87	13.27	12.21
Tuban	15.91	16.31	15.02
Lamongan	13.85	13.86	12.53
Gresik	12.40	12.42	11.06
Bangkalan	20.56	21.57	19.44
Sampang	22.78	23.76	21.61
Pamekasan	14.60	15.30	13.93
Sumenep	20.18	20.51	18.76
Kota Kediri	7.69	7.75	7.23
Kota Blitar	7.78	7.89	7.37
Kota Malang	4.44	4.62	4.37
Kota Probolinggo	7.43	7.44	6.65
Kota Pasuruan	6.66	6.88	6.37
Kota Mojokerto	6.24	6.39	5.98
Kota Madiun	4.98	5.09	4.76
Kota Surabaya	5.02	5.23	4.72
Kota Batu	3.89	4.09	3.79
Jawa Timur	11.09	11.40	10.38

*Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2020-2023*

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase kemiskinan di karesidenan Surabaya dan Bojonegoro selama periode 2020-2022 lebih dominan dibandingkan dengan karesidenan lainnya, antara lain kota Surabaya, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto, kabupaten Jombang, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan.

Tingkat kemiskinan di Jawa Timur selalu berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia adalah provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 4.188.810 jiwa pada tahun 2023. Besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur disebabkan karena adanya ketimpangan antara pencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Jawa Timur sehingga banyak yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019). Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang ada, belum mampu menjangkau keberadaan seluruh penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Timur, terutama di karesidenan Surabaya dan Bojonegoro. Masalah kemiskinan di Jawa Timur menjadi sangat krusial, khususnya dengan hadirnya beberapa daerah yang menjadi kantong kemiskinan. Artinya, daerah ini memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Jawa Timur dan relatif tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu.

Tingginya tingkat kemiskinan di Karesidenan Surabaya dan Bojonegoro menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum merata dan menyeluruh. Pengelolaan *Regional Intellectual Capital (RIC)* dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat pada umumnya bekerja sama untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi modal intelektual di wilayah mereka.

Karesidenan Surabaya dan Bojonegoro yang tergabung dalam provinsi Jawa Timur ini memiliki kesamaan potensi dalam bidang pariwisata. Pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan – kemajuan dalam usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar (Pendit, 1990:65). Kemajuan pariwisata harus diimbangi dengan kemajuan perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata di Karesidenan Surabaya tergolong unggul dengan potensi wisata budayanya. Sementara itu, Karesidenan Bojonegoro masih harus mengembangkan potensi pariwisata yang ada seperti infrastruktur dan berbagai fasilitas umum yang masih perlu dibenahi untuk menunjang kegiatan pariwisata tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Secundo dkk., (2020) mengemukakan bahwa menciptakan strategi pengelolaan modal intelektual di tingkat regional telah menjadi topik hangat karena semakin pentingnya modal intelektual sebagai pendorong kemajuan ekonomi. *Regional Intellectual Capital* (RIC) yang merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh individu, dunia usaha, organisasi, komunitas, dan daerah, serta pada hakikatnya merupakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masa depan, merupakan salah satu elemen terpenting (Ulum dkk., 2023). Selain itu, otoritas publik mengakui nilai investasi RIC yang berdampak pada pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kualitas hidup di tingkat lokal, yaitu di lokasi yang paling mudah diakses oleh masyarakat umum (Shao & Razzaq, 2022).

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu peneliti ini akan membahas dan menganalisis masalah

kemiskinan dengan melakukan penelitian dengan judul “Pengungkapan *Regional Intellectual Capital* (RIC) untuk Menunjang Upaya Pengentasan Kemiskinan (*No Poverty*)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai sebelumnya, penulis membuat satu perumusan masalah yaitu Bagaimana pengungkapan *Regional Intellectual Capital* (RIC) terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Karesidenan Surabaya dan Karesidenan Bojonegoro tahun 2020-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan *Regional Intellectual Capital* (RIC) terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Karesidenan Surabaya dan Karesidenan Bojonegoro tahun 2020-2022.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengungkapan *Regional Intellectual Capital* (RIC) dan Kemiskinan khususnya di Karesidenan Surabaya dan Karesidenan Bojonegoro.